

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Penelitian

 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
JALAN PUTAT INDAH NO.1 TELP. (031) – 5677935, 5681297, 5675493
SURABAYA – (60189)

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 070/ 4797 /209/2023

Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 316), Sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 168);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.

Menimbang : Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Nomer : 1496/K/FISIP/2023 Tanggal : 17 Mei 2023

Nama : **ANUGRAH SURYA RAMADHAN**

Alamat : Pondok jati blok R-8 RT.23 RW.6 Kelurahan Jati kabupaten sidoarjo

Nomor Telepon : 089514590893

Pekerjaan : Mahasiswa

Judul Penelitian : "Implementasi Sistem Pelayanan Via Online (E-Plavon) di Dispendukcapil Kabupaten Sidoarjo"

Bidang Penelitian : Mencari data, Wawancara, Skripsi / Administrasi Publik

Lokasi Penelitian : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo

Waktu Penelitian : 3 (Tiga) Bulan

Status Penelitian : Baru

Anggota Tim Penelitian : -

Demikian Surat Keterangan untuk digunakan seperlunya

Dikeluarkan di : Surabaya
Pada Tanggal : 23 Mei 2023

An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA TIMUR
Sekretaris


NURUL ANSORI, S.Pd, M.Kes
Pembina (IV/a)
NIP. 19700204 200012 1 006

Tembusan :
Yth. Bupati Sidoarjo
Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jl. Raya A. Yani No. 4 Telepon. 031 8921954
Email : bakesbangpolsidoarjo@gmail.com
Website : bakesbangpol.sidoarjokab.go.id

Nomor : 070/1276/438.6.5/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Penelitian/Survey/Kegiatan An. Sdr. ANUGRAH SURYA RAMADHAN

Sidoarjo, 26 Mei 2023
Kepada
Yth. Sdr. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo
di
SIDOARJO

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur nomor : 070/4797/209/2023 tanggal 23 Mei 2023 Perihal **Permohonan Rekomendasi Penelitian / Survey / Kegiatan / PKL / KKN / Magang / OJT**, maka bersama ini kami hadapkan :

Nama : ANUGRAH SURYA RAMADHAN
Tempat/Tgl Lahir : Sidoarjo, 22 Desember 2000
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : Pondok Jati Blok-R8 RT 023 RW 006 Kelurahan Jati Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo
Instansi : UNIVERSITAS 17 AGUSTUS SURABAYA
NIM/NPM : 1111900020 NIK : 3515082212000004
Judul : **IMPLEMENTASI SISTEM WEBSITE PELAYANAN VIA ONLINE (E-PLAVON) DI DISPENDUKAPIL KABUPATEN SIDOARJO**
Pembimbing : Drs. Adi Soesiantoro, M.Si
Peserta : Natasya Eka Putri
Bidang : Teknologi
Tujuan : Permintaan Data, Wawancara dan Penelitian
Waktu : 29 Mei 2023 s/d 30 Juni 2023
Telephone/Hp : 089514590893 e-mail : suryaanugrah344@gmail.com

Untuk melakukan Penelitian/Survey/PKL/KKN/Magang/Kegiatan di Instansi/Wilayah Saudara guna kepentingan studi, dengan syarat-syarat/ketentuan sebagai berikut :

1. Berkewajiban menghormati dan mentaati Peraturan dan Tata Tertib di Daerah setempat/Lokasi Penelitian/Survey/PKL/KKN/Magang/Kegiatan.
2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah/lokasi.
3. Yang bersangkutan diberi tugas sesuai relevansinya dengan mata kuliah/pelajaran di sekolah/ perguruan tinggi.
4. Wajib melaporkan hasil Penelitian ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo dalam kesempatan pertama.
5. Surat Keterangan ini akan dicabut/tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak memenuhi syarat-syarat serta ketentuan seperti tersebut di atas.
6. Melaksanakan Protokol Kesehatan pada saat melakukan Penelitian/Survey/PKL/KKN/Magang/Kegiatan.

Demikian untuk menjadikan Maklum.

Tembusan :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Bappeda Kab. Sidoarjo;
2. Sdr. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
3. Sdr. Yang bersangkutan.

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SIDOARJO**



Ditandatangani secara elektronik oleh

Dr. MUSTAIN, M. Pd.I
NIP. 196503111991031006

Dr. MUSTAIN, M.Pd.I
Pembina Utama Muda
NIP.196503111991031006



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE sesuai dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tandatangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah.



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi : ♦ Administrasi Publik ♦ Administrasi Bisnis ♦ Ilmu Komunikasi
 ♦ Magister Administrasi Publik ♦ Magister Ilmu Komunikasi ♦ Doktor Ilmu Administrasi
 Gedung F 101 Jl. Semolowaru 45 Surabaya (60118)
 Telp. 031-5991742, 5931800 psw. 159 email : fisip@untag-sby.ac.id

Surabaya, 17 Mei 2023

Nomor : 1496/K/FISIPV/2023
 Lampiran : 1 (Satu) Berkas Proposal
 Perihal : **Permohonan Ijin Observasi**

Kepada Yth. : *Kepala Bakesbangpol provinsi Jawa Timur*
Jl. Putat Indah Kelurahan No.1, Putat Gede, Kec. Sukomanunggal, Surabaya, Jawa Timur 60189

Dengan hormat.

Sehubungan dengan pemenuhan data sebagai syarat menyelesaikan Skripsi pada Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan observasi dan wawancara.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka bersama ini kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin dan bantuan kepada mahasiswa di bawah ini:


No.	Nama dan NIM	Alamat	No. Tlp
1.	Anugrah Surya Ramadhan (1111900020)	Pondok Jati Blok R8 Kabupaten Sidoarjo	89514590893

Guna melakukan pengambilan data:


Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo

Dengan judul Skripsi : **"Implementasi Sistem Website Pelayanan Via Online (Eplavon) di Dispendukcapil Kabupaten Sidoarjo"**

Demikian permohonan kami, atas perhatian serta kerjasamanya disampaikan terimakasih.


 Dr. Dra. Ayuun Maduwinarti, MP
 N.P. 20120.87.0103

Lampiran 2 Kartu Bimbingan Skripsi


UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Program Studi : ♦ Administrasi Publik ♦ Administrasi Bisnis ♦ Ilmu Komunikasi
 ♦ Magister Administrasi Publik ♦ Magister Ilmu Komunikasi ♦ Doktor Ilmu Administrasi
 Gedung F 101 Jl. Semolowaru 45 Surabaya (60118)
 Telp. 031-5991742, 5931800 psw. 159 email : fsiip@untag-sby.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Anugrah Surya Ramadhan
 NBI : 1111900020
 Program Studi : Administrasi Negara
 Dosen Pembimbing I : Drs. Adi Soesiantoro, M.Si
 Dosen Pembimbing II : Drs. M. Kendry Widiyanto, M.Si
 Judul Skripsi : IMPLEMENTASI SISTEM WEBSITE PELAYANAN VIA ONLINE (E-PLAVON)
 DIDISPENDUKCABIL KABUPATEN SIDOARJO

No	Tanggal	Saran/Perbaikan	Pembimbing	
			Paraf Dospem 1	Paraf Dospem 2
1.	15/3-23	Par I II III Perbaiki		
2.	21/3-23	Proses Wawancara Buat (Lay Kell)		
3.	19/2-23	Bimbingan teknis		
4.	24/3-23	1. Rombak masalah / Tujuan 2. kerangka konseptual di bagian dan bentuk naratif (2 hal) 3. Buat Daftar Pustaka		
5.	18/4-23	Guida literatur Ac		
6.	5/5	Ke. Capaian & dtd Pub. v. N		
7.	7/6-23	Par 4-5 Ac		



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi : ♦ Administrasi Publik ♦ Administrasi Bisnis ♦ Ilmu Komunikasi
 ♦ Magister Administrasi Publik ♦ Magister Ilmu Komunikasi ♦ Doktor Ilmu Administrasi
 Gedung F 101 Jl. Semolowaru 45 Surabaya (60118)
 Telp. 031-5991742, 5931800 psw. 159 email : fisip@untag-sby.ac.id

No.	Tanggal	Saran/Perbaikan	Pembimbing	
			Paraf Dospem 1	Paraf Dospem 2
	5/8/23	Revisi Bab. 4 Bab. 4 → dipisah Bahas Bab. 5 : jawaban rumusan - kendala → ?		
		Saran : ↑		
9.	12/16/2023	Bab. I 3/4 v. kee prip ujian		

Catatan:

1. Kartu Bimbingan dibawa saat bimbingan
2. Kartu bimbingan diisi oleh Dosen Pembimbing

Bimbingan dinyatakan telah selesai

Tanggal : 12/16/2023

Dosen Pembimbing I,

[Signature]
 (.....)

Dosen Pembimbing II,

[Signature]
 (.....)

Lampiran 3 .Dokumentasi Penelitian

Foto di Dinas Kepndudukan dan Pencatatan Sipil





Dokumentasi di Masyarakat



Lampiran 4 Hasil Turnitin Bab 1,4,5



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEHARA
 LABORATORIUM OTODAERAH
 Gedung F Lantai 2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
 Jl. Semolowaru No. 45 Surabaya, Telp. (031) 5931800

SURAT KETERANGAN

Nomor: 522/K/LOD/V/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini penanggung jawab Uji Turnitin dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Surabaya

Nama : Yusuf Hariyoko, S.AP., M.AP

NPP : 20110170735

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Anugrah Surya Ramadhan

NBI : 1111900020

Berdasarkan hasil uji turnitin untuk Bab 1,4,5 skripsi mahasiswa tersebut telah di bawah 20%.

Surat Keterangan ini di berikan atas permintaan yang bersangkutan untuk "Pendaftaran ujian skripsi".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 16 Juni 2023

Kepala Lab. Otoda,

Yusuf Hariyoko, S.AP., M.AP

Sidoarjo
 2. Memahami faktor apa yang menjadi penghambat dalam penerapan aplikasi Plavon di Dispendukcapil

1.4 Manfaat penelitian

Penelitian ini bermanfaat ini dapat dibagi menjadi 2 bagian yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis:

1. Keunggulan teoritis

A. Kami berharap pengkajian yang penulis teliti dapat memberikan sumbangsih untuk pengembangan pengetahuan, khususnya terkait tentang plavon, sehingga berkembang menuju lebih baik dalam menjalankan layanan berbasis e-government

B. Diharapkan mampu mengembangkan ilmu administrasi publik terkait implementasi e-government, khususnya aplikasi Plavon (Via Online Services) yang dibuat oleh dukcapil Sidoarjo

2. Keuntungan praktis

A. Bagi Instansi (1) Sebagai masukan material refleksi dan evaluasi untuk pengembangan Penerapan Plavon di Dispendukcapil Sidoarjo

B. Bagi Mahasiswa: (1) Memperoleh Pemahaman tentang bentuk penerapan website E-Plavon. (2) Siswa diterima pengetahuan tentang bentuk Implementasi aplikasi plavon

surya

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Student Paper	6%
2	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	3%
3	docplayer.info Internet Source	2%
4	ardyamt567.wordpress.com Internet Source	2%
5	www.coursehero.com Internet Source	1%

Exclude quotes Off Exclude matches Off
 Exclude bibliography On

BAB IV

ORIGINALITY REPORT

18%	17%	4%	10%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.unsri.ac.id Internet Source	4%
2	jurnal.unma.ac.id Internet Source	2%
3	repository.uncen.ac.id Internet Source	1%
4	disdukcapil.kukarkab.go.id Internet Source	1%
5	disporapar.sidoarjojab.go.id Internet Source	1%
6	aksiologi.org Internet Source	1%
7	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Student Paper	1%
8	disdukcapil.sidoarjojab.go.id Internet Source	1%
9	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1%
10	peraturan.bpk.go.id Internet Source	1%
11	repository.ub.ac.id Internet Source	1%
12	repository.uinsu.ac.id Internet Source	1%
13	pt.slideshare.net Internet Source	1%
14	Submitted to Universitas Brawijaya Student Paper	24/27%
15	Arif Eko Wahyudi Arfianto, Ahmad Riyadh U. Balahmar. "PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DESA", JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik), 2016 Publication	<1%

Peraturan Daerah tentang Pengelolaan E-Government di Provinsi Sumatera Barat.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, 91.

Il, B. A. B., Implementasi, A. T., & Gridle, K. (2017). *No Title*. 22–40.

Tentang, S., & Sukses, E. (Ed.). *E-GOVERNMENT DAN PELAYANAN PUBLIK E-GOVERNMENT DI PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN*. 32–42.

Yubeizar, Huda, A., Gunawan, I., & Hariyanto, E. (2017). *Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan E-Government di Provinsi Sumatera Barat. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat*, 91.

suryaa

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

1	repository.unsri.ac.id Internet Source	14%
2	repository.ub.ac.id Internet Source	3%
3	repositori.usu.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes Off Exclude matches Off
 Exclude bibliography On

Lampiran 5 Pedoman Wawancara

Dari Dispendukcapil

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN SKRIPSI
IMPLEMENTASI SISTEM WEBSITE PELAYANAN VIA
ONLINE (PLAVON) DI DISPENDUKCAPIL
KABUPATEN SIDOARJO

Narasumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Teori M.S grindle memiliki 2 teori yaitu Context Policy dan Content Implentation Yaitu:

Context Policy

Kepentingan Mempengaruhi Kebijakan

- Kepentingan apa yang mempengaruhi dalam pembuatan aplikasi plavon ?
- Apakah aplikasi plavon ini dapat membantu kepentingan masyarakat secara Individu yang mana masyarakat banyak yang kurang memahami tentang teknologi untuk kepengurusan Administrasi?

Jenis Manfaat yang akan dihasilkan

1. Manfaat apa saja yang di dapatkan masyarakat dengan adanya aplikasi plavon Serta Dampak Positif dan Negatif Apa saja di dapat dengan adanya aplikasi Plavon baik dari masyarakat maupun dari Dinas dan Pemerintah?

Derajat Perubahan yang diinginkan

- Perubahan apa yang di inginkan dispendukcapil dengan adanya aplikasi plavon?
- Apa saja target yang ingin dicapai Dispendukcapil dengan adanya Aplikasi Plavon Serta target yang sudah tercapai dengan adanya aplikasi Plavon?

Kedudukan Pembuat Kebijakan

- Dalam pembuatan aplikasi Plavon ini dibentuk berdasarkan kebijakan apa ?
- Peran Kepala Dinas dan pemerintah dalam pengembangan Aplikasi Plavon serta Peran apa saja yang telah dicapai oleh Dispendukcapil dalam pegenalan Plavon?

1

Siapa pelaksana Program

- Siapa Pelaksana Program aplikasi Plavon ?
- Apakah hanya Dispendukcapil Pelaksana Program Aplikasi Plavon dan apakah masyarakat serta Kelurahan dan kecamatan ikut Serta dalam pengembangan aplikasi Plavon?

Siapa pelaksana Program

- Siapa Pelaksana Program aplikasi Plavon ?
- Apakah hanya Dispendukcapil Pelaksana Program Aplikasi Plavon dan apakah masyarakat serta Kelurahan dan kecamatan ikut Seta dalam pengembangan aplikasi Plavon?

Sumber daya yang dikerahkan

- Sumber daya yang dibutuhkan dalam pengelolaan dan pembuatan Aplikasi plavon?
- Apa Saja Sumber daya dan Fasilitas yang diberikan Pemerintah kepada Dispendukcapil dalam Pengelolahan dan Pengembangan Aplikasi Plavon?

Contex Implentation**Kekuasaan Kepetingan dan strategi aktor yang terlibat**

- Strategi Dispendukcapil dalam pengenalan aplikasi plavon kepada masyarakat?

Karakteristik Lembaga dan penguasa

- Apakah masyarakat diberikan fasilitas pengaduan ?
- Pengaruh Dispendukcapil dalam Pengenalan Aplikasi Plavon?

Kepatuhan dan Daya Tanggap

- Respon Masyarakat terhadap aplikasi Plavon?
- Respon atau Tanggapan Dispendukcapil dengan adanya aplikasi Plavon?

Pertanyaan Tambahan

- a. Prosedur Pelayanan Melalui Website?
- b. Ketetapan Sasaran Program?
- c. Tujuan Program Plavon?
- d. Apa Saja Kendala Pelaksanaan Aplikasi Plavon?
- e. Bagaimana bentuk Sosialisasi yang dilakukan pada Program Plavon?
- F. Faktor Pendukung dan penghambat dalam pengembangan Plavon?

Pedoman Masyarakat

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN SKRIPSI
IMPLEMENTASI SISTEM WEBSITE PELAYANAN VIA
ONLINE (PLAVON) DI DISPENDUKCAPIL
KABUPATEN SIDOARJO

Narasumber: Masyarakat Pengguna Aplikasi Plavon

Teori M.S grindle memiliki 2 teori yaitu **Contex Policy** dan **Content Implentation** Yaitu:

Contex Policy

Kepentingan Mempengaruhi Kebijakan

- Apa program Aplikasi Plavon terdapat kepentingan yang mempengaruhi Bapak/Ibu?

Jenis Manfaat yang akan dihasilkan

1. Manfaat apa saja yang di dapatkan Bapak/Ibu dengan adanya aplikasi plavon ?

Derajat Perubahan yang Diinginkan

- Perubahan apa yang di inginkan Bapak/Ibu dengan adanya aplikasi plavon?

Kedudukan Pembuat Kebijakan

- Apakah Aplikasi Plavon ini sudah tepat dilaksanakan di Dispendukcapil ini?

Siapa pelaksana Program

- Apakah Petugas Dinas Sudah kompeten dalam melakukan Pelayanan menggunakan aplikasi Plavon?

Sumber daya yang dikerahkan

- Bagaimana Kualitas dan Kuantitas SDM dalam pemakaian aplikasi Plavon apakah sudah Bisa menggunakan atau belum dikarenakan banyak nya masyarakat kita yang Kurang memahami teknologi?

Contex Implentation

Kekuasaan Kepentingan dan strategi aktor yang terlibat

- Apakah Bapak/Ibu ikut terlibat dalam pengenalan aplikasi plavon kepada masyarakat?

Karakteristik Lembaga dan penguasa

1

- Apakah Aplikasi Plavon ini sudah sesuai dilaksanakan di dispendukcapil Sidoarjo?

Kepatuhan dan Daya Tanggap

- Respon Bapak/Ibu terhadap aplikasi Plavon?

Lampiran 6 LOA



COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA
DEPARTEMEN PENERBITAN

PRAJA Observer: JURNAL PENELITIAN ADMINISTRASI PUBLIK

e-ISSN: 2797-0469, Jl. Nginden Intan Timur XV. No. 11 Surabaya, Indonesia

<https://www.aksiologi.org/index.php/praja/index>; e-mail: prajajurnal@gmail.com



PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik

3/05/2023/#1107

L.o.A

11/06/2023

Kepada
ANUGRAH SURYA RAMADHAN
suryaanugrah344@gmail.com;
ADI SOESANTORO
adi_susiantoro@untag-sby.ac.id;
M. KENDRY WIDIYANTO
kenronggo@untag-sby.ac.id;

Di
Program Studi Administrasi Publik,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
INDONESIA

Sehubungan dengan naskah artikel ilmiah yang saudara kirimkan ke redaksi jurnal PRAJA Observer, maka dengan ini redaksi informasikan bahwa naskah anda telah diproses untuk publikasi di Jurnal PRAJA Observer. Redaksi sangat mengapresiasi kontribusi naskah anda ke jurnal PRAJA Observer. Dan redaksi telah mengambil keputusan mengenai pengajuan naskah berjudul: **IMPLEMENTASI SISTEM WEBSITE PELAYANAN VIA ONLINE (PLAVON) DI DISPENDUKCAPIL KABUPATEN SIDOARJO**, yang diterbitkan pada bulan September Tahun 2023: Volume 3, No. 05 (2023).

Dengan keputusan redaksi adalah: "DITERIMA"

Hormat kami,

Editor in Chief,

Kusnan

PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik

<https://aksiologi.org/index.php/praja/index>



CiteFactor



Lampiran 7 Kebijakan Perbub no 8 tahun 2017



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI
PADA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, merupakan kebutuhan masyarakat dalam rangka percepatan perizinan penanaman modal serta kepastian hukum, maka dipandang perlu penerapan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi;
- b. bahwa penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan perizinan satu pintu, merupakan tuntutan globalisasi informasi dan mendukung transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Sidoarjo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Teknologi Informasi pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kotamadya dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2.

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4734);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5348);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 41/PER/MEN.KOMINFO/VI/2004 tentang Panduan Mutu, Jangkauan Pelayanan dan Pengembangan Aplikasi E-Government;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara;

3.

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 Nomor 12, Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 53);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun

3

- 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 14 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 53);
- 15 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70);
- 16 Peraturan Bupati Sidoarjo No. 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidoarjo;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI PADA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
2. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
3. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidoarjo.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidoarjo.
5. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, selanjutnya disingkat "PTSP", adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang saling berkaitan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

4

6. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas akses, dan informasi mengenai Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpukan, menyajikan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan perizinan terpadu satu pintu dengan penerapan teknologi informasi.

5

Pasal 3

Pemanfaatan dan penggunaan teknologi informasi bertujuan untuk mewujudkan :

- a. Pelayanan perizinan dan non perizinan yang mudah, cepat, tepat, dan terjangkau; dan
- b. Pelayanan perizinan secara transparan dan akuntabel.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Penyelenggaraan PTSP dengan pemanfaatan dan penggunaan teknologi informasi meliputi :

- a. Perizinan;
- b. Non-Perizinan.

Pasal 5

- (1) Pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 di laksanakan oleh Dinas dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Dalam hal jenis pelayanan perizinan belum menggunakan teknologi informasi akan dilakukan secara manual.
- (4) Dinas wajib memberikan bantuan dalam hal pemohon tidak mengetahui cara penggunaan teknologi informasi untuk proses perizinan.

Pasal 6

- (1) Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pelayanan perizinan di Dinas sekurang-kurangnya meliputi proses pelayanan :
 - a. Proses Pengajuan;
 - b. Proses Verifikasi;
 - c. Proses Validasi;
 - d. Proses Pengesahan dengan tanda tangan elektronik;
 - e. Proses Penomoran;
 - f. Proses penerbitan keputusan perizinan;
 - g. Pengaduan atau keberatan.
- (2) Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pelayanan non perizinan di Dinas sekurang-kurangnya meliputi

6

- b. Informasi tentang persyaratan tatacara perizinan dan non-perizinan;
 - c. Informasi tatacara penggunaan teknologi informasi;
 - d. Informasi kebijakan atau rencana umum penanaman modal;
 - e. Kemudahan layanan; dan
 - f. Fasilitas/fasilitas;
- (2) Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pelayanan perizinan dan non perizinan dapat berbentuk informasi elektronik, pemanfaatan web, pemanfaatan aplikasi dan bentuk lainnya yang termasuk teknologi informasi.
- (3) Dinas berwenang menentukan dan mengembangkan bentuk teknologi informasi yang digunakan dalam layanan perizinan dan non-perizinan.

Pasal 7

Pemohon layanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib menjamin kebenaran dan keabsahan keterangan, data dan/atau dokumen sesuai dengan ketentuan persyaratan perizinan.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas berwenang :
- a. mengatur penggunaan jaringan elektronik;
 - b. mengelola keamanan elektronik dan jaringan elektronik;
 - c. mengelola informasi yang ditampilkan dalam web, aplikasi atau bentuk lainnya;
 - d. mengelola terhadap pelayanan perizinan dengan menggunakan teknologi informasi; dan
 - e. mengarsip secara digital.
- (2) Pelayanan berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi.
- (3) Dinas sebagai penyelenggara PTSP dengan menggunakan teknologi informasi wajib :
- a. menyediakan panduan penggunaan teknologi informasi;
 - b. menjamin ketersediaan layanan berbasis teknologi informasi;
 - c. menjaga keamanan proses dan data;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan dan penggunaan teknologi informasi ;

7

- e. memelihara pusat data, piranti lunak, piranti keras dan telekomunikasi;
- f. menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagai dasar perbaikan dan pengembangan pelayanan berbasis teknologi informasi.

Pasal 9

Perizinan yang diterbitkan melalui system elektronik harus dengan menggunakan tanda pengaman yang menjamin keabsahan dokumen.

- Kelembagaan sebagai :
- a. menyediakan panduan penggunaan teknologi informasi;
 - b. menjamin ketersediaan layanan berbasis teknologi informasi;
 - c. menjaga keamanan proses dan data;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan dan penggunaan teknologi informasi ;

7

- e. memelihara pusat data, piranti lunak, piranti keras dan telekomunikasi;
- f. menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagai dasar perbaikan dan pengembangan pelayanan berbasis teknologi informasi.

Pasal 9

Perizinan yang diterbitkan melalui system elektronik harus dengan menggunakan tanda pengaman yang menjamin keabsahan dokumen.

BAB III PEMBAYARAN

Pasal 10

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan PTSP berbasis teknologi informasi dibebankan pada APSP.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi :
- a. Pembangunan sarana dan prasarana;
 - b. Pengelolaan;
 - c. Pemeliharaan;
 - d. Pengembangan.

BAB IV KETENTUAN PEKALIHAN

Pasal 11

Penerapan penuh penggunaan teknologi informasi semua perizinan atas proses Perizinan dan non Perizinan yang menjadi wewenang Dinas dimulai satu tahun sejak Peraturan Bupati ini berlaku.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Kepala Dinas harus menetapkan standard operasional prosedur dan memberi nama/nomenklatur penerapan teknologi informasi pada pelayanan terpadu satu pintu.

Lampiran 8 Lembar Revisi

13.50 - 14.20

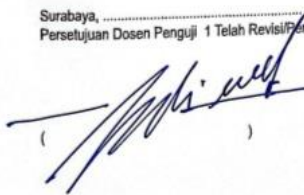

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

LEMBAR REVISI UJIAN SKRIPSI

Nama : Anugrah Surya Ramadhan
NIM : 1111900020
Hari/ Tanggal Ujian : Rabu, 21 Juni 2023

Catatan Perbaikan:

Surabaya,
Persetujuan Dosen Penguji 1 Telah Revisi/Perbaikan, Revisi dari Dosen Penguji 1.

() ()

Catatan: Bila tidak ada revisi, dosen penguji wajib menuliskan "tidak ada revisi", dan menandatangani di sebelah kanan dan

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

LEMBAR REVISI UJIAN SKRIPSI

Nama : Anugrah Surya Ramadhan

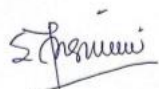
NIM : 1111900020

Hari/ Tanggal Ujian : Rabu, 21 Juni 2023

Catatan Perbaikan:

- o) Format penulisan mengacu pd buku pedoman penulisan.
- o) judul, rumusan & ran.
- o) Data blm lengkap!
- o) Kesimpulan menjawab tujuan pnt. ssi & hasil yg & dpt & keri
 saran melihat & kekurangan yg ada & ketimp.

Surabaya,
 Persetujuan Dosen Penguji 1 Telah Revisi/Perbaikan, Revisi dari Dosen Penguji 1,

()

()

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

LEMBAR REVISI UJIAN SKRIPSI

Nama : Anugrah Surya Ramadhan

NIM : 1111900020

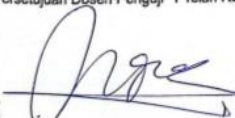
Hari/ Tanggal Ujian : Rabu, 21 Juni 2023

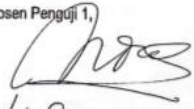
Catatan Perbaikan:

1. RM di balok posisinya dan typos, manfaat.
2. Pnet terdulu & tambas jadi 10.4.
3. Plabun masalah & tambas.
4. Teori berkaitan dg fokus pnet.

Surabaya, 21/6/2023

Persetujuan Dosen Penguji 1 Telah Revisi/Perbaikan, Revisi dari Dosen Penguji 1,


 (Anugrah Surya Ramadhan)


 (Inang)

Lampiran 9 **Jurnal**

**IMPLEMENTASI SISTEM WEBSITE PELAYANAN VIA ONLINE
(PLAVON) DI DISPENDUKCAPIL KABUPATEN SIDOARJO**

Anugrah Surya Ramadhan

Program Administrasi Publik

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

suryaanugrah344@gmail.com

Drs. Adi Soesiantoro, M.Si

Program Administrasi Publik

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Drs. M. Kendry Widiyanto, M.Si

Program Administrasi Publik

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

kenronggo@untag-sby.ac.id

ABSTRAK

Perkembangan teknologi komunikasi yang ada telah mengubah paradigma komunikasi yang dominan, yang sebelumnya terkesan satu arah – antara pemerintah dan masyarakat. Perkembangan teknologi komunikasi juga telah memperluas kemungkinan terjadinya komunikasi dua arah, yaitu antara masyarakat dengan pemerintah dan sebaliknya. Di sini terjadi perubahan atau transformasi dalam mekanisme kerja pemerintahan yang kini diarahkan pada pengelolaan strategi informasi dan komunikasi. eGovernment adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Kata Kunci: Perkembangan, e-government, Pelayanan Publik

PENDAHULUAN



Gambar Tampalk Depan Dinas Kependududkan dan Catatan Sipil

E-government merupakan upaya untuk mengembangkan pemerintahan berbasis elektronik. Rancangan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah melalui optimalisasi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, keunggulan e-government yaitu pertama, cost reduction

terletak pada melalui sistem online, biaya manajemen, administrasi dll. berkurang. Kedua, Anda meningkatkan transparansi dan akuntabilitas karena masyarakat dapat dengan mudah mengakses dan melihat sejauh mana kegiatan pemerintah telah dilakukan. Manfaat lain dari e-government adalah pelayanan masyarakat.

Aplikasi Plavon adalah layanan online yang disediakan oleh administrasi kependudukan dan catatan sipil. Hal ini merupakan salah satu inovasi layanan yang dikembangkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Berbasis Internet (web-based) untuk lebih mempermudah dan mempercepat proses pelayanan di bidang penanggulangan kependudukan. Pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil baik dapat dilakukan secara mandiri maupun melalui plavon berbasis web- Staf layanan pengembangan aplikasi yang akan dilakukan, yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat untuk mengelola dokumen manajemen kependudukan mereka secara mandiri

atau oleh petugas pelayanan di semua titik pelayanan, termasuk oleh petugas pendaftaran Adminduk. Penyelenggara yang sudah terdaftar dapat menyerahkan pelayanan seperti KTP, KIA, akte kelahiran, akta kematian, kartu keluarga dan dokumen kependudukan lainnya ke pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil secara online. Sangat praktis dan efisien dalam administrasi dan sangat membantu masyarakat. Aplikasi ini berbasis web dan dapat dijalankan di berbagai smartpone, sehingga e-plavon ini dapat berguna saat memproses dan mengirim dokumen.

Penerapan aplikasi Plavon juga diperkuat dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan terpadu satu pintu melalui Peraturan Bupati (Perbub) Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2017. Perda ini mengatur penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan terpadu satu pintu. jasa. Kesepakatan antara lain, namun tidak terbatas pada: Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Pembiayaan dan Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Tahun 2008 Penyelenggaraan Manajemen Kependudukan Kabupaten Sidoarjo. Serta Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 102 Tahun 2016 Tentang Kependudukan

Plavon juga dibuat berdasarkan Permendagri Pedoman 7 Tahun 2019 yang berisi tentang pedoman pelayanan berbasis online. Aplikasi Plavon dapat dibuat berdasarkan kebijakan ini.

Menurut Clay G. Weslatt (15 Agustus 2007) dalam websitenya, e-government adalah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mempromosikan pemerintahan yang lebih efisien dan hemat biaya, kemudian memfasilitasi pelayanan kepada masyarakat umum, dan membuat pemerintah lebih akuntabel kepada masyarakat .

Di zaman modern ini perkembangan e-government sangat dibutuhkan karena dengan adanya e-government semakin memudahkan masyarakat dalam memberikan pelayanan ketika sedang sibuk dan malas untuk menghubungi kantor Dukcapil Sidoarjo yaitu dalam satu aplikasi Website ini aplikasi berbasis dirancang untuk membantu Dukcapil memberikan layanan dan disebut Aplikasi Plavon.

Permasalahan yang biasa ditemui antara lain (1) kurangnya pemahaman masyarakat umum tentang cara penggunaan aplikasi Plavon berbasis web (2) aplikasi yang kompleks dan kurangnya pengenalan kepada masyarakat (3) aplikasi jarang digunakan sehingga lupa cara dia menggunakan,

TINJAUAN PUSTAKA

Grindle memperkenalkan model implementasi kebijakan sebagai proses politik dan administratif. Model menggambarkan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh berbagai pemangku kepentingan, hasil akhirnya ditentukan oleh materi program atau oleh interaksi pembuat keputusan dalam konteks administratif. Proses politik dapat dilihat melalui proses pengambilan keputusan yang melibatkan aktor kebijakan yang berbeda, sedangkan proses administrasi dapat dilihat pada proses umum yang berkaitan dengan tindakan administratif yang terlihat pada tingkat program.

Hal ini perlu disadari agar kebijakan dapat berfungsi optimal dan sejalan dengan tujuan yang diharapkan melalui kebijakan yang tepat. Selain itu,

proses implementasi kebijakan ini sangat dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya.

Isi kebijakan dalam teori Grindle terdiri dari:

1. kepentingan yang mempengaruhi
2. tipe manfaat
3. derajat perubahan yang diinginkan
4. letak pengambilan keputusan
5. pelaksana program
6. dan sumber daya yang dilibatkan

Sedangkan konteks implementasi mencakup hal-hal seperti kekuasaan,

1. .Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat
2. Karakteristik lembaga dan penguasa
3. Kepatuhan dan daya tanggap

METODE PELAKSANAAN

Jenis metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan cenderung menggunakan analisis data. Landasan teori sebagai pedoman agar fokus penelitian ini sesuai dengan fakta di lapangan. Penelitian kualitatif sebagai alat manusia berfungsi untuk menentukan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, memastikan kualitas data, menganalisis data, menginterpretasikan data, dan menarik kesimpulan dari hasil (Sugiyono, 2017). Informan dalam metode kualitatif terus (snowball) sengaja dikembangkan sampai data yang dikumpulkan dianggap memuaskan atau berlebihan. Metode penelitian kualitatif lebih menekankan pada aspek pemahaman mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat masalah untuk penelitian generalisasi. Tujuan metode penelitian ini bukanlah generalisasi melainkan pemahaman yang mendalam terhadap suatu masalah. Penelitian kualitatif berfungsi untuk memberikan kategori isi dalam penelitian kualitatif

Fokus penelitian dalam sebuah penelitian adalah untuk memperjelas studi , sehingga studi tersebut akan mempermudah penelitian dalam pengambilan dan pengolahan data yang kemudian menjadi sebuah kesimpulan. Sesuai dengan

permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka diperoleh fokus penelitian yang penulis tetapkan agar dapat memberikan batasan studi pada fokus penelitian yang akan di teliti, fokus penelitian yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah

1. Dukcapil Sidoarjo, yang meliputi :
 - a. Prosedur Pelayanan Melalui Website
 - b. Ketepatan sasaran program
 - c. Tujuan Program Plavon
 - d. Penggunaan aplikasi berbasis web dalam melakukan pelayanan
 - e. Sosialisasi Program
2. Beberapa faktor yang menjadi tantangan serta hambatan dalam memberikan pelayanan melalui Aplikasi berbasis web Plavon (Pelayanan Via Online) yaitu :
 - a. Sosialisasi terhadap pelayanan Aplikasi Plavon
 - b. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pemakaian aplikasi plavon yang berbasis web
 - c. Aplikasi yang rumit dan kurang pengenalan ke masyarakat
 - d. Jarang nya aplikasi dipakai sehingga lupa cara penggunaannya

Untuk dapat menganalisis keadaan yang sebenarnya dari objek penelitian diperlukan suatu tempat penelitian. Penelitian ini bertempat di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo. Lokasi ini dipilih karena Ducakpil memiliki sistem aplikasi berbasis web yaitu Plavon (Via Online Service).

Alasan pemilihan lokasi ini peneliti melihat adanya program e-government yang baru di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sidoarjo, dimana pada

tahun 2021 ini dibuat aplikasi platform baru yang berfungsi untuk membatasi jumlah orang yang datang ke kantor tersebut, pada saat itu Indonesia terkena dampak pandemi Covid-19.

Metode pengumpulan data adalah metode yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan. Untuk mendapatkan data yang diperlukan, penelitian ini dibagi menjadi tiga cara, yaitu :

4. Wawancara

Wawancara langsung dengan informan dalam penelitian ini Kabid atau Sub Koordinator sistem informasi kependudukan serta pengembangan sistem adm Plavon. Didapatkan angka resmi penduduk dan beberapa sumber salah satunya dari masyarakat Kabupaten Sidoarjo yang telah menggunakan aplikasi Plavon di Kantor Dispenndukcapil Kabupaten Sidoarjo.

5. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data. Pengamatan ini dilakukan langsung di kantor Dispenndukcapil Kabupaten Sidoarjo, sebagai pelengkap data penelitian. Pada saat observasi sebenarnya peneliti langsung masuk ke dalam dan melihat kondisi kantor catatan sipil dan dinas kependudukan kabupaten sidoarjo..

6. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses mengumpulkan data tertulis atau tercetak. Peneliti melakukan dokumentasi dengan mengambil foto dari setiap objek yang diteliti dan merekamnya saat wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini memaparkan hasil dan pembahasan dari data yang diperoleh di lapangan baik melalui wawancara langsung maupun tidak langsung melalui bahan tertulis dan observasi sebagai bagian dari penelitian.

“IMPLEMENTASI SISTEM WEBSITE PELAYANAN VIA ONLINE (E-PLAVON) DI DISPENDUKCAPIL KABUPATEN SIDOARJO” Hasil penelitian ini berupa wawancara dan observasi dianalisis sesuai dengan fokus penelitian yang ditetapkan.



Gambar Aplikasi Plavon Berbasis Web

Keberhasilan dari implementasi Sistem Website Pelayanan Via Online (Plavon) di Dispendukcapil Kabupaten Sidoarjo dianalisis oleh peneliti dengan menggunakan teori implementasi yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle yang dikenal dengan Implementasi sebagai Proses Politik dan Administrasi. Fokus penelitian ini adalah pada dua dimensi penelitian model implementasi Merilee S. Grindle sebagai berikut

1. Isi Kebijakan (Content of Policy). Ada 6 indikator dalam dimensi ini, yakni :

- 1) Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi Aplikasi Plavon adalah adanya keinginan untuk merubah bentuk Pelayanan Adminduk yang mana pelayanan yang dahulu berbentuk Offline dan berkembang menuju pelayanan online berbasis web aplikasi Plavon
- 2) Tipe manfaat yang bisa diperoleh, dengan adanya Aplikasi Plavon adalah dengan adanya Aplikasi Berbasis Web Plavon masyarakat serta dari dinas merasa terbantu dengan pelayanan maupun kepengurusan Adminduk.
- 3) Derajat perubahan yang ingin dicapai, dari adanya plavon adalah aplikasi ini dapat terus berkembang dalam melakukan pelayanan dan kepengurusan admiduk agar proses lebih cepat dan tertib administrasi.

4) Letak pengambilan keputusan, aplikasi plavon ini adalah Aplikasi ini dibuat berdasarkan Permendagri nomer 7 tahun 2019 dan peranan dinas dalam melakukan sosialisasi sudah dilakukan melalui sosial media yang mana diharapkan bisa mengenalkan aplikasi plavon kepada masyarakat.

5) Pelaksana program, dalam Pengembangan Aplikasi plavon Dinas Kependudukan Catatan Sipil lah yang berperan dalam pengembangannya serta pelaksanaan dan dibantu oleh mitra seperti Kelurahan, Kecamatan dan puskesmas dan juga masyarakat dapat melakukan kepengurusan admiduk secara mandiri.

**Rekapitulasi Pengguna Plavon Dukcapil
sampai Bulan Mei 2023**

No	Pengguna	Total
1	Masyarakat	179,426
2	Mitra	94
Total		179,520

Gambar penggunaan aplikasi plavon

6) Sumber-sumber daya yang digunakan memiliki hasil observasi yang menunjukkan bahwa, sumber daya manusia di Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo sudah mencukupi dalam melakukan tugas dan fungsi, terutama dalam melaksanakan kegiatan pelayanan adminduk untuk masyarakat salah satunya program adalah aplikasi Plavon.

Dinas Kependudukan telah memiliki seksi khusus yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan Plavon yaitu. Kasi Pengembangan Sistem Adm. Kependudukan

2. Lingkungan Kebijakan (Context of Policy). Ada 3 indikator dalam dimensi ini,

Yakni :

1) Hasil observasi peneliti dilapangan, Sosilalisasi yang menurut peneliti kurang gencar dalam pengenalannya sehingga masyarakat yang gagap teknologi menjadi bingung dalam menggunakan aplikasi Plavon dan Kurangnya keinginan masyarakat untuk belajar tentang Digitalisasi . Ini merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya Kurang Gencarnya sosialisasi, masyarakat hanya tahu dari Staff Dinas naupun staff Kecamatan dan Kelurahan dalam Penggunaan Aplikasi Plavon.

2) Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa. Hasil observasi di lapangan menunjukkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menyediakan sarana penyampaian keluhan, yaitu berupa website berupa web, Nomor Whassaapp dan Email media sosial berupa Facebook agar masyarakat bisa mendapat bantuan atau keluhan terhadap pelayanan.



Logo of the Indonesian government and the local government of Sidoarjo.

Search bar and menu icon.

Email : helpdesk3515@gmail.com

WhatsApp : 081230134878

Alamat : Jl. Sultan Agung No.23
Sidoarjo

Bentuk Pengaduan

Nama

NIK

Saran dan Masukan

3)Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana. Adalah masyarakat sera dinas sangat mersepon baik dengan adanya aplikasi Plavon dan merasa terbantu dan kepengurusan admiduk lebih cepat karena hasil langsung dikirm lewat Whatsaap atau email.

PENUTUP

Program Aplikasi Plavon merupakan salah satu program Pelayanan yang berupa bentuk perwujudan dari Keinginan adanya pelayanan online berbasis web. Aplikasi Plavon adalah Simsetm Pelayanan Via Online Bebasis Web yang dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo sebagai bentuk pelaksanaan Pelayanan Online. merupakan pelaksanaan Berdasarkan hasil analisa data pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi E-government Aplikasi Plavon di Dispendukcapil Kabupaten Sidoarjo secara umum sudah berjalan dengan baik hanya saja masih ada ditemukan beberapa kendala yang menghambat proses implementasi E-Government Aplikasi Plavon. Implementasi Program Aplikasi Plavon dapat dilihat dari beberapa variabel yang menjadi masalah dalam Implementasi tersebut yaitu:

1. Sosialisasi yang daidakan secara offline jarang dilakukan dan lebih sering dilakukan secara online yang mana masyarakat yang kurang paham teknologi tidak bisa ikut sisoalisasi
2. Sering terjadi sinyal yang buruk jika kita mengikuti sosialisasi secara online

DAFTAR PUSTAKA

Ii, B. A. B., Implementasi, A. T., & Grindle, K. (2017). *No Title*. 22–40.

Ii, B. A. B., & Teori, L. (2010). *No Title*. 16–49.

Sidoarjo, D. I. K. (n.d.). *No Title*.

Yuhefizar, Huda, A., Gunawan, I., & Hariyanto, E. (2017). Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan E-Government di Provinsi Sumatera Barat. *Pemerintah Provinsi Sumatera Barat*, 91.

The screenshot displays a plagiarism report interface. At the top, there is a large empty rectangular box. Below it, the word "Jurnal" is centered. Underneath, a section titled "ORIGINALITY REPORT" shows four similarity metrics: 16% for Similarity Index, 13% for Internet Sources, 7% for Publications, and 14% for Student Papers. A section titled "PRIMARY SOURCES" lists eight items with their respective similarity percentages:

Rank	Source	Similarity
1	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya (Student Paper)	6%
2	repository.unsri.ac.id (Internet Source)	4%
3	www.neliti.com (Internet Source)	3%
4	digilibadmin.unismuh.ac.id (Internet Source)	1%
5	core.ac.uk (Internet Source)	1%
6	repository.fisip-untirta.ac.id (Internet Source)	1%
7	stikespanakkukang.ac.id (Internet Source)	1%
8	repository.uinsu.ac.id (Internet Source)	1%

At the bottom of the interface, there are two toggle options: "Exclude quotes" (On) and "Exclude bibliography" (On). On the right side, there are two options: "Exclude matches" (Off) and "OR" (Off).